

GLOBALISASI DAN REFORMASI KEUANGAN INTERNASIONAL

Rahmatina A.K.

Pendahuluan

Globalisasi berasal dari kata "Global", yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner berarti "*covering or affecting the whole world*", sehingga secara etimologis kita bisa menginterpretasikan globalisasi sebagai sebuah proses dinamis-berkelanjutan yang mempengaruhi seluruh dunia. Lebih jauh lagi, menurut Thomas L. Friedman, proses tersebut meliputi "*...the inexorable integrations of markets, nation-states and technologies to a degree never witnessed before-in a way that is enabling individuals, corporations and nation-states to reach around the world faster, deeper and cheaper than ever before. And in a way that is enabling the world to reach into individuals, corporation and nation-states farther, faster, deeper and cheaper than ever before.*" (Friedman, 2000).

Globalisasi, dengan *free-market capitalism* sebagai pendorong utamanya, mempunyai struktur kekuatan tersendiri, *Pertama*, globalisasi mempunyai aturan ekonominya sendiri, yang meliputi ekonomi yang lebih terbuka, deregulasi dan privatisasi ekonomi agar lebih kompetitif dan menarik bagi investasi asing. *Kedua*, globalisasi mempunyai *dominant culture*nya sendiri, yang menurut sebagian besar orang adalah gejala Amerikanisasi. *Ketiga*, globalisasi punya teknologinya sendiri: komputerisasi, miniaturisasi, *digitization*, komunikasi satelit, *fiber optics* dan internet, yang kekuatannya mampu menyatukan dunia. *Keempat*, globalisasi memiliki pola demografis yang ditandai oleh akselerasi migrasi yang sangat cepat, dalam skala nasional maupun internasional. *Terakhir*, globalisasi mempunyai struktur dan sistem kekuasaan/kekuatan sendiri.

Sistem globalisasi dibangun oleh tiga kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, meliputi kekuatan tradisional antar *nation-states*, antara *nation-states* dengan pasar global dan antara individual dengan *nation-states*.

Dalam sistem globalisasi, saat ini Amerika merupakan satu-satunya negara adikuasa yang dominan, sedangkan negara-negara lainnya merupakan subordinat dengan derajat tertentu. Kekuatan Amerika itu menjadikannya sebagai penguasa di bidang ekonomi.

Kekuatan kedua, antara *nation-state* dan pasar global, dibentuk oleh jutaan investor yang mampu memindahkan uang mereka ke seluruh penjuru dunia hanya dengan meng-klik sebuah *mouse* (Friedman menamakan mereka sebagai *Electronic Herd*), yang kemudian bersatu dalam pusat keuangan internasional seperti Wall Street, Hong Kong, London dan Frankfurt (yang dinamakan Friedman : *The Supermarket*).

Sedangkan kekuatan individual yang bisa mempengaruhi *nation-state* bisa kita lihat dalam sosok George Soros. Soros merupakan seorang *fund manager* handal yang banyak melakukan spekulasi di pasar keuangan internasional dan disebut-sebut sebagai biang terjadinya krisis ekonomi di negara-negara Asia, setelah sebelumnya mengguncang Poundsterling pada tahun 1992. Namun demikian, beberapa pakar ekonomi seperti Paul Krugman tidak setuju dengan pendapat ini. Menurutnya, kekuatan pasarlah -*Quantum Fundnya* Soros dan *Electronic Herd*lah- yang memicu krisis ekonomi tersebut, sebagai konsekuensi wajar dari globalisasi ekonomi¹. Dan diantara ketiga kekuatan tersebut, dua yang terakhir memiliki peran besar dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia semenjak pertengahan 1997.

Dalam perkembangannya, globalisasi telah membawa serangkaian dampak baik positif maupun negatif terhadap perekonomian dunia yang kemudian mengimbas ke bidang-bidang lainnya. Dampak positifnya berupa peningkatan volume dan karakter arus-arus sumber daya internasional: ekspansi perdagangan; peningkatan ukuran, daya saing dan difusi pasar keuangan; terciptanya lapangan kerja yang semakin beragam, pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi, dsb.

Namun demikian globalisasi juga berdampak sangat negatif, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga. Todaro (1997) mencatat bahwa globalisasi cenderung memperkecil kekuatan dan pengaruh ekonomi suatu negara secara individual (apalagi jika negara itu adalah negara berkembang yang kemampuannya serba terbatas), meningkatkan resiko instabilitas pasar finansial yang berdampak meningkatnya utang luar negeri negara-negara dunia ketiga, akses ke pasar dunia bagi produsen berteknologi rendah semakin terbatas, dan meningkatnya arus migrasi internasional ilegal dari berbagai negara (selatan) yang miskin ke negara-negara industri (di utara) yang lebih makmur.

Bagaimana dengan Indonesia ? Berlakukah pandangan Todaro tentang globalisasi di Indonesia? Kita akan coba melihat beberapa kasus

¹ Paul Krugman, 1999, *The Return of Depression Economics*. London: Penguin Group.

yang terjadi di Indonesia, khususnya menyorot dampak globalisasi setelah krisis ekonomi Indonesia.

Globalisasi dan Perdagangan Luar Negeri Indonesia : Kasus Perdagangan Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat

Paling tidak sejak awal dekade 1970-an, perekonomian dunia mengalami berbagai perubahan penting dan bersifat mendasar. Ketidakseimbangan perdagangan dunia, khususnya antara Jepang dan Jerman dengan Amerika Serikat, menimbulkan berbagai macam perselisihan yang mengarah pada kecenderungan praktek-praktek proteksionisme. Gerakan ke arah regionalisme makin menguat seperti ditunjukkan oleh perkembangan Pasar Tunggal Eropa 1992, pembentukan NAFTA, AFTA, APEC, EFTA, atau FTAA yang dideklarasikan di Quebec City, Canada, akhir April 2001 ini. Kecenderungan-kecenderungan tersebut membawa tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor dan impornya, baik barang maupun jasa. Dan karena besarnya volume ekspor-impor Indonesia dengan Amerika Serikat, maka saya sengaja mengangkat kasus ini.

Secara garis besar, perdagangan Indonesia-AS berjalan baik. Perdagangan bilateral meningkat dari US\$ 5,1 milyar tahun 1987 menjadi US\$ 12,5 milyar tahun 1997. Ekspor dan impor Indonesia bisa dibilang sangat mengandalkan pasar AS. Namun demikian bagi AS ekspor dan impor Indonesia mempunyai pangsa yang sangat kecil, kurang dari 1 %.

Nilai ekspor Indonesia ke AS menempati urutan ketiga setelah Jepang dan Uni Eropa sebagai kelompok negara. Dari tahun 1990 hingga pecahnya krisis tahun 1997, total ekspor dan impor Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Begitu pula dengan ekspor ke AS yang meningkat lebih dari dua kali lipat, dari US\$ 3,4 milyar tahun 1990 menjadi US\$ 7,1 milyar tahun 1997. Sementara peningkatan ekspor ke Jepang dan Uni Eropa relatif lebih lambat. Namun dengan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997, nilai total ekspor menunjukkan penurunan, begitu pula ekspor ke AS yang tahun 1999 turun relatif kecil menjadi US\$ 6,9 milyar. (Lihat tabel I).

Tabel I. Nilai Ekspor Impor Indonesia dengan Dunia dan Beberapa Negara Terpilih, 1990, 1995-1999

(Dalam US\$ Juta)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
			Ekspor			
AS	3365	6322	6795	7133	7031	5896
Jepang	10923	12288	12885	12461	9116	10145
Uni Eropa	5391	6760	7724	8056	7766	7085
Total	25675	45418	49815	53443	48848	48665
			Impor			
AS	2520	4756	5060	5441	3517	2839
Jepang	5300	9217	8504	8252	4292	2913
Uni Eropa	6651*)	8175	9234	8333	5866	3801
Total	21837	19629	42929	41680	27337	24003

*) Tahun 1993

Sumber: BPS, *Indikator Ekonomi*

Dari sisi impor, AS juga menempati urutan ketiga setelah Uni Eropa dan Jepang. Nilai total impor Indonesia ke AS mula-mula meningkat relatif cepat dari US\$ 21,8 milyar tahun 1990 menjadi US\$ 42,9 milyar tahun 1996, namun kemudian terus menurun dengan tajam hingga menjadi US\$ 24,0 milyar tahun 1999. Dari tabel I juga terlihat bahwa awalnya impor dari AS meningkat relatif cepat dari US\$ 2,5 milyar tahun 1990 hingga mencapai US\$ 5,7 milyar tahun 1997, dan baru kemudian menurun tajam menjadi US\$ 2,8 milyar tahun 1999.

Neraca perdagangan Indonesia-AS selalu menunjukkan surplus yang cukup berarti bagi Indonesia, khususnya pada tahun-tahun krisis dimana impor menurun dengan cukup tajam sementara ekspor

menurunnya relatif kecil. Ekspor Indonesia yang terus meningkat dan menyebabkan surplus perdagangan Indonesia terus membesar menyebabkan Indonesia dicurigai dan oleh AS dimasukkan dalam daftar pengawasan *US Trade Representative* (USTR). Malah baru-baru ini, AS kembali menyatakan Indonesia sebagai negara prioritas untuk diawasi (*priority watch list*) berkaitan dengan pelanggaran hak milik intelektual (*intellectual property rights*) bersama 15 negara lain dan Uni Eropa². Namun pada sisi lain, untuk mempermudah akses pasar barang-barang Indonesia, AS tetap memberikan fasilitas GSP (*Generalized System of Preferences*), walaupun masih terkait dengan proteksi dan persyaratan-persyaratan tertentu seperti kebebasan untuk membentuk serikat kerja, perundingan upah secara kolektif dan adanya standar kesehatan dan keamanan. Ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke AS dibatasi dengan kuota tertentu yang diatur dalam *Multifibre Arrangement* sebagai salah satu bentuk proteksi AS terhadap perdagangan domestiknya.

Dalam hal perdagangan jasa, Indonesia menderita defisit yang sangat besar karena transfer keuntungan perusahaan-perusahaan AS, khususnya di bidang eksplorasi migas, sektor keuangan, lisensi, franchise, paten, tenaga kerja AS yang bekerja di Indonesia, dll.

Permasalahan dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan AS kerap terjadi karena AS menginginkan akses pasar dan investasi yang lebih luas ke Indonesia, namun pada saat yang bersamaan berusaha menghambat perdagangan Indonesia ke AS dan menunjukkan 'keadikuasaannya' dengan menggunakan isu-isu lingkungan hidup, HAM, HAKI, dsb sebagai dalih.

Sebagai contoh, AS mengenakan embargo impor ikan tuna bersirip kuning dari Indonesia selama lima bulan pada semester pertama tahun 1992 karena pada penangkapannya terjadi pembantaian ikan lumba-lumba. Kemudian Indonesia juga dituduh membantai jenis kura-kura langka yang hampir punah dan dilindungi pada kegiatan penangkapan udang laut dalam. Indonesia terbebas dari sanksi ini karena bisa membuktikan bahwa Indonesia dalam penangkapan udang tersebut menggunakan "*turtle escape device*". Dalam hal impor kayu lapis, AS menerapkan perlakuan tarif yang diskriminatif terhadap berbagai negara pemasok, misalnya terhadap Indonesia dikenakan tarif 8,2% ; terhadap Brasil 4% dan terhadap Malaysia-Filipina 0%.

² *Indonesia Masuk Priority Watch List AS*, 2001. Kompas, 2 Mei.

Globalisasi dan Pasar Keuangan Indonesia

Pasar Keuangan Indonesia hingga saat ini masih ditandai oleh peran vital sektor perbankan. Sektor ini berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari unit surplus ke unit defisit, dan dimanfaatkan oleh sebagian besar pelaku sektor real. Sementara peran pasar modal (*saham/stock* dan *obligasi/bond*) dan lembaga keuangan lainnya (*reksadana, dana pensiun, dll*) bagi pelaku sektor real masih relatif kecil, walaupun saat ini mulai memperlihatkan peningkatan. Karena itulah saya akan lebih memfokuskan pembahasan pada kondisi sektor perbankan di Indonesia.

Krisis perbankan di Indonesia dewasa ini tergolong yang paling parah dan relatif termahal di dunia sepanjang abad lalu. Beban biaya yang ditanggung oleh perekonomian mencapai 47% PDB Indonesia. Sementara itu, sebagaimana terlihat dalam tabel 2, biaya restrukturisasi perbankan akibat gelombang krisis yang diderita Korea hanya 17% PDBnya, sedangkan Thailand sebesar 29%PDB. Kemelut perbankan yang terjadi di negara-negara Amerika Latin dalam dua dekade terakhir juga tidak separah Indonesia.

Tabel 2.

Biaya Restrukturisasi
Beberapa Krisis Perbankan

Episode Krisis Perbankan	Dalam Persen PDB
Negara Asia (1997-)	
Korea	17
Thailand	29
Indonesia	47
Chile (1981-87)	29
Mexico (1994-99)	19
Sweden (1990-93)	4
United States	2

Sumber : IMF

Menurut Faisal Basri³, paling tidak ada dua penyebab utama kehancuran perbankan di Indonesia. *Pertama*, terlalu longgarnya aturan perbankan terutama sejak digulirkannya Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 27, 1988). Betapa tidak, mendirikan bank sangat mudahnya, hingga dalam waktu yang relatif singkat jumlah bank menjamur. Jumlah bank yang ada meningkat dari hanya 83 bank pada tahun 1987 menjadi 213 bank di tahun 1995, dan jumlah bank cabang meningkat dari 1283 menjadi 46011 dalam periode yang sama. Jumlah dana yang dimobilisasi meningkat empat kali lipat dari US\$ 1 milyar pada Desember 1988 menjadi US\$ 85 pada tahun 1994⁴. Sumber dana berasal dari dalam dan luar negeri (*offshore borrowing*).

Melonjaknya jumlah perbankan secara cepat dan tiba-tiba bukannya tanpa masalah. Cepatnya pertumbuhan perbankan tidak diiringi oleh kemampuan BI melakukan pengawasan, sehingga terjadi peningkatan resiko *mismanagement* perbankan. Selanjutnya, karena cadangan (*reserved ratio*) perbankan diturunkan dari 15% menjadi hanya 2%, bank-bank mengalami surplus dana untuk dipinjamkan, hingga mereka saling berkompetisi meningkat pemberian pinjaman. Sebagai konsekuensinya terdapat trend yang meningkat terhadap kredit macet, kebangkrutan bank dan penipuan.

Persoalan lain muncul karena Paket Oktober 1988 secara implisit menganut *free entry*, sementara aturan dan supervisi yang lemah sangat menyulitkan terjadinya *free exit*. Dengan kata lain pemerintah hendak menerapkan prinsip persaingan bebas pada sektor perbankan yang *notabene* secara alamiah berkarakter oligopolistik. Akibatnya, saat terjadi krisis ekonomi di negara-negara tetangga, hanya sebagian dari bank-bank yang tersebut mampu bertahan. Jumlah bank swasta nasional terpangkas separuhnya, dari 160 buah sebelum krisis menjadi hanya 81 bank saja per Juni 2000.

Kedua, bank dan sektor real kian terintegrasi dalam jalinan kepemilikan pada seseorang atau sekelompok orang yang sama. Keadaan demikian sebenarnya tak akan membawa dampak yang terlalu negatif seandainya aturan main ditegakkan. Keadaan diperparah mengingat praktek-praktek bisnis-termasuk pemberian pinjaman usaha- dinaungi oleh sistem politik yang otoriter dan korup. Maka, tatkala terjadi guncangan pada sendi-sendi politik, otomatis bangunan usaha-termasuk perbankan- juga turut oleng.

³ Faisal Basri. *Menuju Sosok Perbankan Nasional yang Ideal*. Bahan kuliah Ekonomi Politik di FEUI, tahun ajaran 2000/2001.

⁴ RADIUS Prawiro. *Indonesia's Struggle for Economic Development*. New York: Oxford University Press, 1998, p.244.

Pada bulan Juni 1997, dalam laporannya mengenai Indonesia, pihak *World Bank* menyatakan kegembiraannya akan kinerja ekonomi Indonesia yang cukup kuat. Namun *World Bank* juga mengingatkan kemungkinan terjadinya masalah sehubungan dengan defisit *Current Account* dan besarnya pinjaman luar negeri swasta, khususnya sektor perbankan. Bulan berikutnya, IMF juga mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa terdapat kelemahan yang serius dan terus berkembang dalam sistem perbankan Indonesia. Walau demikian, IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya masih tetap percaya pada kemampuan Indonesia untuk pulih dari krisis, terutama mengingat keberhasilan-keberhasilan perekonomian Indonesia sebelumnya.

Di lain pihak, sebagian *fund managers* dan *forex dealers* sebenarnya telah lama sinis melihat perkembangan ekonomi Indonesia, terutama mengenai praktek-praktek korupsi dan prospek kestabilan politik jangka panjang. Pedagang-pedagan valas Singapura misalnya, mulai melepas rupiah dan menjual dollar, diikuti oleh *Electronic Herd* lainnya diseluruh penjuru dunia. Rupiah mengalami depresiasi. Defisit Neraca Berjalan (current account) makin besar. Nilai utang luar negeri Indonesiapun membengkak. Dan tiap kali nilai rupiah terdepresiasi, tingkat kepercayaan pasar terhadap kemampuan Indonesia keluar dari krisis makin berkurang, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai tindakan seperti menjamin uang nasabah yang tersimpan di perbankan nasional dan kebijakan uang ketat dengan menaikkan tingkat suku bunga nasional hingga mencapai 40%.

Hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya memperbaiki pondasi sektor perbankan, salah satunya melalui rekapitalisasi perbankan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Namun hingga saat ini belum tampak tanda-tanda meyakinkan bahwa penanganan selama ini mengarah pada penyelesaian tuntas (*once and for all*), paling tidak untuk jangka pendek.

Globalisasi dan Arus Migrasi Internasional Illegal

Sebelum krisis, upaya untuk melakukan penciptaan lapangan kerja terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pendirian industri-industri baru dan pengembangan agrobisnis. Namun jumlah angkatan kerja terus bertambah sementara jumlah lapangan kerja yang disediakan pemerintah tidak mencukupi. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mencari lapangan-lapangan kerja di luar negeri.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan devisa negara.

Data-data⁵ menunjukkan bahwa :

1. Pelita I (1969-1974): TKI bekerja di luar negeri berjumlah 5.624 orang, 59% diantaranya bekerja di Belanda.
2. Pelita II (1974-1979) :TKI bekerja di luar negeri berjumlah 17.042 orang
3. Pelita III (1979-1984) : TKI bekerja di luar negeri berjumlah 96.410 orang, 64% diantaranya dikirim ke Timur Tengah.
4. Pelita IV (1984-1989) : TKI bekerja di luar negeri berjumlah 292.262 orang.
5. Pelita V (1989-1994) : TKI bekerja di luar negeri berjumlah 652.272, dimana 60%nya masih didominasi oleh TKI ke Timur Tengah.

Angka-angka ini adalah angka-angka resmi yang bersumber dari Departemen Tenaga Kerja.Selain melalui jalur resmi, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi/*illegal*. Menurut *United Nations* (1994) migran ilegal adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan untuk masuk, tinggal atau menjalankan kegiatan ekonomi.

Jumlah TKI ilegal tidak dapat diperkirakan secara tepat. Graeme Hugo (1997) memperkirakan bahwa pada tahun 1995 ada 990.000 TKI ilegal yang bekerja di berbagai negara. Bahkan Hugo menyatakan bahwa TKI ilegal Indonesia yang berada di Malaysia merupakan migrasi ilegal terbesar kedua setelah migrasi orang-orang Mexico ke AS. Diperkirakan jumlah TKI ilegal di Malaysia tersebut mencapai 600.000 orang . Sementara pada saat yang bersamaan jumlah TKI legal ke Malaysia diperkirakan hanya separuhnya⁶. Jumlah TKI ilegal ini terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan peningkatan jumlah TKI Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Panjangnya birokrasi yang harus dilalui juga menyebabkan arus TKI ilegal ke negara lain jumlahnya lebih besar dari pada jumlah TKI legal (*Country Report: Indonesia, 1992*).

⁵ Wiyono, Nur Hadi. *Krisis Ekonomi dan Dampaknya bagi Migrasi Internasional*. Warta Demografi, Th-28, No 3, 1998.

⁶ Adi, Rianto. *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Migrasi Internasional*. Warta Demografi, Th-28, No 3, 1998.

Kesimpulan dan Saran

Sejauh ini, fakta-fakta di Indonesia menunjukkan kesesuaian dengan pola dampak globalisasi yang dialami sebagian besar negara berkembang menurut Todaro.

Di bidang perdagangan, dalam kasus perdagangan dengan AS, terlihat bahwa kekuatan dan pengaruh ekonomi Indonesia terhadap AS amat kecil. Namun sebaliknya peran AS amat penting sebagai importir sekaligus eksportir terbesar bagi perekonomian Indonesia. Kenyataan itu menjadikan AS bersikap seenaknya dan malahan menggunakan proteksi yang lebih besar dalam perdagangannya dengan Indonesia.

Dari sisi keuangan internasional, fakta menunjukkan bahwa Indonesia belum mempunyai pondasi struktur keuangan (khususnya perbankan) yang kuat. Akibatnya krisis keuangan yang melanda negara lain dengan cepat merembes ke Indonesia dan meruntuhkan perekonomian Indonesia, meningkatkan utang luar negeri Indonesia, menghilangkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia hingga mekanisme penyesuaian yang mestinya terjadi secara otomatis tidak terjadi.

Terakhir, krisis ekonomi Indonesia juga memacu migrasi internasional TKI, terutama migrasi internasional ilegal ke negara-negara kaya.

Apa yang harus kita –dan sebagian besar negara berkembang lainnya- lakukan menghadapi kenyataan seperti itu? Apakah kita harus berdiam diri saja menerima kenyataan ini, dan membiarkan diri semakin tertindas dalam *neo-colonialism* ini?

Menghadapi kenyataan seperti itu, mau tak mau harus diadakan serangkaian reformasi terhadap sistem ekonomi internasional. Dan menurut Todaro lagi, paling tidak harus ada reformasi yang menyentuh bidang-bidang pokok sebagai berikut:

1. Pengurangan beban utang luar negeri negara-negara dunia ketiga, terutama yang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, ataupun melaksanakan program-program stabilisasi dan pengetatan ekonomi yang ‘dianjurkan’ IMF dan Bank Dunia.
2. Peningkatan arus bantuan resmi (berbunga rendah, bermasa pembayaran cukup panjang) dari negara-negara maju. Bisa pula dilakukan penciptaan sumber-sumber dana internasional yang baru, seperti *Tobin Tax* (pajak atas transaksi internasional).

3. Penciptaan lembaga-lembaga keuangan internasional yang baru, seperti semacam Bank Sentral Dunia, sebagai *Lender of Last Resort* lembaga keuangan yang telah ada di dunia.
4. Reformasi menyeluruh lembaga-lembaga keuangan internasional yang telah ada, seperti IMF dan World Bank, hingga mereka nantinya mampu lebih mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dunia.

Namun sebelum reformasi keuangan internasional tersebut dilaksanakan, tentu saja Indonesia harus berbenah diri ke dalam dulu. Perekonomian nasional yang terus terpuruk harus segera diperbaiki. Sektor perbankan harus segera dipulihkan, sehingga dengan demikian sektor riil juga bergairah kembali. Dengan demikian agenda restrukturisasi dan rekapitalisasi menjadi suatu hal yang harus dipercepat. Sektor moneter juga harus terus diperbaiki dan dipulihkan, terutama mengenai regulasi didalamnya dan regulasi mengenai independensi BI sebagai bank sentral. Sektor fiskal juga mempunyai PR yang sama. Selama ini sistem perpajakan di Indonesia cenderung tidak efektif karena lemahnya administrasi pemungutan pajak serta banyaknya kebocoran pajak, apakah itu karena banyak masyarakat yang tidak membayar pajak maupun karena besarnya tingkat KKN di lembaga-lembaga perpajakan. Manajemen makro harus kembali memprioritaskan stabilisasi perekonomian nasional.

Yang tak kalah pentingnya adalah “governance” dan pembangunan institusi yang sehat. Krisis telah menyebabkan rusaknya institusi ekonomi yang sangat strategis seperti BI, BUMN, Bulog, Pertamina, dll. Hal ini diperparah dengan tidak adanya usaha nyata dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk memperbaikinya. Yang ada malahan konflik-konflik elit politik yang memperparah keadaan dengan menurunkan tingkat kepercayaan pasar terhadap Indonesia.

Itu semua merupakan PR kita bersama, tidak hanya pemerintah. Dan sejalan dengan itu kita tetap dapat terus terlibat dalam usaha reformasi ekonomi internasional yang telah disebutkan diatas. Dewasa ini upaya-upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan dihapuskannya utang beberapa negara termiskin di dunia di Afrika. Indonesia sendiri belum cukup berhasil dalam upaya pengurangan utang ini. Namun kita harapkan di masa depan usaha-usaha ini akan membuahkan hasil yang lebih berarti. Dengan demikian Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya bisa mengurangi ketakutan akan menjadi korban yang tertindas dari proses globalisasi.

Bibliografi

Adi, Rianto. 1998. *Dampak Krisis Ekonomi Pada Migrasi Internasional*. Warta Demografi, Th-28, No 3.

AS Cabut Embargo Ikan Tuna dari Indonesia, Kompas, Jakarta, 13 Juni 1992.

Baihaqi, A. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Indonesia sebelum Memasuki Krisis Ekonomi 1997*. Bahan kuliah Perekonomian Indonesia di FEUI, tahun ajaran 2000/2001.

Basri, Faisal H. 2001. *Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2001*. Bahan Kuliah Ekonomi Politik di FEUI, tahun ajaran 2000/2001.

Friedman, Thomas L. 2000. *Understanding Globalisation: The Lexus and The Olive Tree*. New York: Anchor Books.

Indonesia Masuk Priority Watch List AS. 2001. Kompas, 2 Mei .

Kasri, Rahmatina A. 2000. *Global Economy*. Essay ditulis untuk *International Students Festival in Trondheim (ISFiT-01)*.

Krugman, Paul. 1999. *The Return of Depression Economics*. London: Penguin Books.

Mann, Richard. 1998. *Economic Crisis in Indonesia : The Full Story*. London: Gateway Books.

Oxford Advanced Learner Dictionary. 1991. New York : Oxford University Press.

Prawiro, Radius. 1998. *Indonesia's Struggle for Economic Development*. New York: Oxford University Press.

Tarmidi, Lepi T. 2000. *Hubungan Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Hubungan Indonesia-Amerika Serikat oleh Pusat Kajian Amerika Serikat.

----- 1997. *Indonesia-US Economic Relations under APEC : Problems and Prospects*, dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jakarta : LPEM-FEUI, Vol. XLV No. 2, hal. 335-367.

Globalisasi dan Reformasi Keuangan Internasional (Rahmatina A.K.)

Todaro, Michael P. 1997. *Economic Development. Sixth Edition*. London: Addison Wesley Longman Limited.

Wiyono, Nur Hadi. 1998. *Krisis Ekonomi dan Dampaknya bagi Migrasi Internasional*. *Warta Demografi*, Th-28, No 3.

